

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMETAAN POTENSI DESA
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH
(STUDI PADA DESA SENGGURUH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR)**

Mochamad Archan¹, R Djoko Andreas Navalino² dan
Thomas Gabriel J.³

e-mail:

mochamad.archan@mp.id.ac.id

Abstrak:

Dewasa ini terdapat banyak kejadian dimana setelah diturunkannya Dana Desa ternyata Desa belum siap dalam hal perencanaan pengelolaan dana yang ada untuk apa. Untuk itu diperlukan penelusuran kebutuhan berdasarkan potensi yang harus dikembangkan di lokasi desa dengan berlandaskan pada mimpi dan potensi yang dimiliki (Strength Based Solving). Berdasarkan konsep tersebut, masyarakat diminta untuk menemukan kecakapan-kecakapan berdasarkan kebutuhan. Sehingga didapatkan daftar prioritas pengembangan, agenda pembangunan, serta untuk mendukung program dan pengembangan wilayah yang diperlukan dalam inovasi sosial. Pada gilirannya di masa mendatang dapat meningkatkan pendapatan warga, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian melalui riset cepat, wawancara mendalam, pengamatan langsung serta analisis hasil FGD, maka diperoleh hasil jenis pengembangan yang dibutuhkan berupa kebutuhan pendirian wadah yang dapat menunjang perekonomian desa dan memaksimalkan Kader masyarakat untuk membantu peran dari aparat desa serta membuat peraturan desa, melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pemberdayaan masyarakat.

Adapun saran penelitian ini antara lain kepada para pemegang kebijakan di desa yaitu tentang perlunya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk memudahhi kegiatan perekonomian di Desa dan mengaktifkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk membantu peran dari aparat desa serta membuat peraturan desa, melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci : ketahanan masyarakat, ketahanan ekonomi daerah , pemberdayaan masyarakat, pemetaan potensi desa.

¹ Penulis Lulusan Pasca Sarjana Universitas Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Program Studi Ekonomi Pertahanan

² Pembimbing Penulis adalah Sekretaris Program Studi Teknologi Persenjataan, Dosen Universitas Pertahanan

³ Pembimbing Penulis adalah Dosen Program Studi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan

PENDAHULUAN

Upaya mensejahterakan masyarakat telah dilakukan melalui banyak hal oleh pemerintah, termasuk salah satunya dengan program memberdayakan masyarakat itu sendiri melalui aspek pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik. Sehingga harapannya dengan upaya pemberdayaan tersebut mampu mengentaskan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal itu mengingat penduduk miskin di Indonesia termasuk dalam jumlah yang cukup besar hingga mencapai 60% penduduk berada dibawah garis kemiskinan⁴. Tapi yang terjadi upaya pemberian bantuan pemerintah tersebut terkadang masih kurang tepat sasaran dikarenakan belum adanya identifikasi potensi di masyarakat itu sendiri sebelum memberikan bantuan, sehingga bantuan yang diterima masyarakat dan juga respon kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri belum dilandasi oleh keberadaan potensi yang mereka miliki.

⁴ Poerwoko Soebiyanto, Pemeberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik(Bandung;Alfabeta,2012) hlm. 25

Terdapat tiga hal yang menjadi indikator kesejahteraan suatu masyarakat menurut Bambang Suprayitno yaitu: Pertama Adanya pemerataan pendapatan yang berarti bahwa pendapatan suatu negara atau kelompok masyarakat hampir bisa dikatakan merata bagi semua orang atau tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Hal ini tentu berkaitan dengan tersedianya lapangan kerja, penguasaan sumber-sumber ekonomi dan sumber daya alam yang dimanfaatkan secara menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua Pendidikan yang bisa dirasakan oleh semua pihak dan kalangan, baik itu tingkat dasar maupun untuk pendidikan tinggi. Pemerintah diharuskan mampu memberikan fasilitas pendidikan yang murah tapi juga berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, sehingga dampaknya kualitas pengetahuan masyarakat akan tinggi dan berdaya saing sumber daya manusiannya dengan negara lain. Ketiga tentang Kualitas kesehatan yang meningkat dan harapan hidup yang tinggi. Kesehatan merupakan faktor penting yang menunjang kesejahteraan masyarakat, karena tanpa kesehatan yang

bagus tidak akan tercapai apapun keinginan yang diharapkan oleh masyarakat. Dan apabila masih banyak terdapat keluhan di masyarakat tentang gangguan kesehatan dan wabah penyakit, maka negara dianggap belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakatnya.⁵

Untuk kondisi di Indonesia saat ini kesenjangan pendapatan yang ada masih tergolong tinggi, dan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menargetkan angka ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia bisa terus ditekan pada tahun 2018. Menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan target rasio gini, indikator ketimpangan pendapatan, bisa ditekan ke level 0,38, dari angka 0,393 per bulan pada Maret tahun 2017.⁶ Rasio gini memiliki rentang 0 untuk pemerataan sempurna dan 1 untuk ketimpangan sempurna, dimana semakin rendah angka rasio gini, maka angka pemerataan

⁵ Bambang Suprayitno, *Ekonomi Publik Konsep dan Implikasi Kebijakan*, (Yogyakarta; UPP Stim YKPN 2017) hlm.42

⁶ Bambang Brodjonegoro, Bappenas: Sangat Tak Mudah Menekan Rasio Gini 0,01, dalam <https://pemeriksaanpajak.com/2017/12/19/bappenas-sangat-tak-mudah-menekan-rasio-gini-001/> diakses pada 2 Februari 2018.

pendapatan penduduk akan semakin membaik.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini pada bulan September tahun 2017 mencapai 0,391. Angkanya turun tipis jika dibandingkan pada bulan Maret tahun 2017 yang sebesar 0,393. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan ketimpangan memang bukan hal mudah karena membutuhkan roadmap jangka panjang.⁷ Dan untuk mencapai angka ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya. Untuk ketimpangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin, campur tangan pemerintah diperlukan, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem, terutama yang berada di pedesaan dan pinggiran kota, sehingga akan terjadi pemerataan pendapatan.

Campur tangan pemerintah dilakukan diantaranya melalui penyaluran

⁷ Suhariyanto, BPS Jelaskan Penyebab Rasio Gini Turun Tipis, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1046814/bps-jelaskan-penyebab-rasio-gini-turun-tipis> diakses pada 2 Februari 2018

subsidi tepat sasaran, terutama untuk subsidi barang kebutuhan pokok konsumsi rumah tangga sehari-hari bagi 40 (empat puluh) persen masyarakat berpendapatan terendah. Jika konsumsi masyarakat tersebut naik, akan otomatis berpengaruh pada perputaran roda ekonomi Nasional secara menyeluruh, menggerakkan sektor riil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berkaitan dengan upaya mencapai kesejahteraan dan pemerataan untuk masyarakat tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Cita-cita dan semangat undang-undang nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk perlindungan dan pemberdayaan desa di Indonesia agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dengan asas utama rekognisi dan subsidiaritas.

Perlindungan dan pemberdayaan desa di Indonesia bertujuan agar desa nantinya dapat menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur membutuhkan komitmen koordinasi yang sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di pedesaan Indonesia yang menurut Badan pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, dari 255 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, sebanyak 119 juta jiwa (46,7%) penduduk Indonesia hidup di desa. Maka dari itu desa memiliki peranan penting untuk memulai kesejahteraan sosial.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah merubah karakteristik desa yang sebelumnya kurang diperhatikan, saat ini berubah menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan. Karena sebelum adanya undang-undang desa tersebut, kewenangan yang dimiliki desa untuk menyelenggarakan pemerintahan sangatlah terbatas, karena desa tidak lebih dari kepanjangan tangan dari pemerintahan Kabupaten yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten. Dengan adanya undang-undang desa tersebut telah diikuti dengan

mulainya pencairan dana desa ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Banyak daerah yang mencoba mengadopsi strategi-strategi sukses yang dilakukan oleh daerah lainnya, tetapi tidak sepenuhnya berhasil, hal itu dikarenakan penerapan strategi yang dilakukan tanpa dilandasi dengan menemukenali potensi lokal yang ada di wilayahnya terlebih dahulu. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Boediarso Teguh Widodo, terdapat 44 (empat puluh empat) desa yang tersebar di 9 (sembilan) daerah di Indonesia dianggap gagal melakukan penyerapan dana desa tahap I⁸. Hal itu berakibat pada pencairan jatah dana mereka tahap ke II yang dibuka pada pekan kedua bulan Agustus tahun 2017 yang lalu tidak bisa dicairkan. Kurangnya kemampuan untuk menemukenali potensi yang ada yang bisa dikembangkan dalam membangun desanya. Serta adanya hambatan yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni yang ada untuk membangun desanya dan

juga urbanisasi dari desa ke kota masih menjadi kendala perkembangan dan pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Daya Tarik kota baik itu sebagai tempat menempuh pendidikan bagi generasi muda dan juga tempat untuk mencoba mencari kerja menjadi tantangan bagi desa untuk berusaha bersaing dan tampil menarik terutama bagi generasi muda desa.

Terdapat dua azas yang menjadi wewenang desa berdasarkan undang-undang desa tersebut yang dikembalikan kewenangannya kepada desa yaitu azas rekognisi yang merupakan pengakuan dari pemerintah pusat apa yang menjadi hak asal usul desa. Dimana Desa sudah memiliki hak-hak tersebut sejak dulu bahkan sebelum Republik Indonesia ini di deklarasikan, contoh yaitu pemilihan kepala desa, gotong royong dan adat istiadat desa. Yang kedua yaitu azas subsidiaritas yang berarti desa bukan hanya menerima mandat dari Pemerintah Kabupaten, tapi desa berhak menyelenggarakan kewenangan tersebut tanpa menunggu pelimpahan dari Pemerintahan Kabupaten, contohnya adalah pelaporan untuk pemotongan

⁸ Boediarso Teguh Widodo, 44 Desa Gagal Salurkan Dana Desa, dalam <http://infobanknews.com/44-desa-gagal-salurkan-dana-desa/> di akses pada 3 Februari 2018

hewan yang tidak bisa dipantau secara menyeluruh oleh Kabupaten, maka hal itu diserahkan kepada desa⁹.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga hal penting yang menjadi amanat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam memajukan perkembangan desa setelah turunnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut yaitu¹⁰ pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemasyarakatan. Untuk itu sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang mampu mendukung pertumbuhan wilayah desa tersebut harus memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar memiliki daya saing dan semangat yang mumpuni serta tekad yang kuat untuk turut serta dalam pembangunan di desanya. Salah satu kota yang menarik untuk dibahas tentang pemberdayaan masyarakat, potensi daerah dan potensi desanya adalah Kabupaten Malang, yang merupakan ikon wisata dan kota kedua di

Jawa Timur setelah Ibukota Propinsi Jawa Timur Surabaya. Menariknya membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan potensi daerah di Kabupaten Malang adalah karena “Malang” seolah-olah tiada habisnya untuk dibahas dan dibicarakan atau dituliskan potensinya. Hal itu dikarenakan di Kabupaten Malang selalu ada yang baru baik dari sisi pengembangan potensi tujuan wisatanya, wisata kulinernya dengan makanan-makanan khas daerahnya, dan juga flora fauna serta tradisi pengelolaan seni budayanya.

Kabupaten Malang terletak pada 112°03'51" sampai 112°57'00" Bujur Timur, serta 7°04'55" sampai 8°02'35" Lintang Selatan. Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang yang berada tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri terletak di sebelah barat, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan; dan Kota Batu terletak di sebelah utara, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang di sebelah timur, serta Samudra Hindia atau pantai selatan di sebelah selatan.

Salah satu potensi desa di Kabupaten Malang adalah desa Sengguruh, dimana Desa Sengguruh

⁹ Rusnadi Padjung, Desa; Bukan Sekedar Pemerintahan Lokal, Pusat Data dan Studi Kemendesa, (Jakarta; Info Desa Edisi Oktober 2016) hlm.26

¹⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB Penjelasan

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur saat ini¹¹ masih terdapat potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kemaslahatan seluruh masyarakat desa, diantaranya banyak tenaga potensial yang ada di desa belum diajak dan diberdayakan secara utuh untuk turut serta membangun desa. Banyaknya pemuda desa yang memiliki pendidikan tinggi yang seharusnya bisa dijadikan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga belum dilakukan secara maksimal.

Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur adalah salah satu wilayah yang perlu mendapatkan jenis-jenis pelatihan dan pengembangan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Penelusuran kebutuhan dan pemetaan sumberdaya berbasis potensi di Desa Sengguruh memerlukan strategi yang tepat untuk menentukan jenis pelatihan, pembangunan, dan inovasi sosial sesuai potensi dari desa itu sendiri. Diselenggarakannya penelitian

Pemberdayaan Potensi Desa di Desa Sengguruh agar terpilih kecakapan-kecakapan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat sehingga didapatkan daftar prioritas kebutuhan masyarakat, agenda pembangunan, serta untuk mendukung program dan pengembangan wilayah yang diperlukan untuk inovasi sosial yang nantinya dapat menopang ketahanan ekonomi daerah.

Sarana Prasarana Ekonomi Desa yang saat ini sudah ada diantaranya adalah : Pasar Desa, Kelompok simpan pinjam, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), serta semua akses jalan beraspal sebagai sarana perhubungan/ transportasi antar kampung.

Permasalahan secara umum yang ada di Desa Sengguruh saat ini adalah : Luas lahan pertanian yang semakin sempit, Kelompok petani (HIPPA/Himpunan Petani Pemakai Air, maupun kelompok Tani) kurang berfungsi, belum adanya Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang kurang berperan, tenaga kerja bidang pertanian berkurang,

¹¹ RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Sengguruh, Tahun 2013-2019, hal.16

lebih banyak beralih ke bidang jasa, industri dan lainnya, tingkat perkembangan penduduk yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia, serta tenaga kerja muda sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya.

Pada saat musim tanam banyak petani yang memerlukan pupuk dan saat ini mereka selalu membelinya ke kota, begitu juga di saat panen petani selalu didatangi tengkulak yang menawar harga panennya dengan harga yang murah. Peternak juga kesulitan menjual hasil ternaknya ke pasaran karena belum ada kelompok peternakan yang mengelola hasil peternakan yang dihasilkan oleh warga. Masih kurangnya penanganan untuk pemasaran hasil panen maupun pengelolaan tanaman hasil pertanian dan ternaknya. Dengan adanya pasar desa, harusnya kegiatan perekonomian akan lebih maju bila pengelolaannya dilakukan secara maksimal, begitu juga dengan adanya SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang merupakan satu-satunya di wilayah Kecamatan Kepanjen selatan harusnya dapat menjadi magnet penggerak ekonomi desa, kenyataannya

jumlah pengangguran di Desa Sengguruh cenderung masih tinggi, masih diatas 11% dari seluruh jumlah penduduk sebanyak 4017 Jiwa.

Bertitik tolak dari fenomena yang diungkap dalam latar belakang, maka dapat dikemukakan pernyataan masalah (*problem statement*) sebagai berikut : belum teridentifikasinya potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh desa, dan belum adanya aplikasi jenis pelatihan yang sesuai kebutuhan masyarakat desa, pembangunan, dan inovasi sosial terhadap potensi wilayah setempat di desa Sengguruh. Oleh karena belum adanya analisis kebutuhan yang tepat berbasis potensi dari Desa Sengguruh itu sendiri yang saat ini sangat diperlukan, bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan, sehingga nantinya akan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, dengan Demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemetaan Potensi Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi pada Desa Sengguruh, Kecamatan**

Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur).”

Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah menemukenali potensi desa khususnya di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sehingga nantinya desa mampu merencanakan kegiatan pembangunan yang akan mendukung ketahanan ekonomi daerah.

Subfokus Penelitian ini lebih pada Penggalan potensi desa di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Pemberdayaan masyarakat Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan pemetaan skala prioritas dari potensi-potensi desanya dan dengan Potensi di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur tersebut bagaimana berupaya menjadikan rencana pembangunan yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian (*research question*) yang akan dijadikan dasar penelitian adalah : Bagaimana Penggalan potensi

desa dilakukan di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur? Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dapat dilaksanakan berorientasi dari potensi-potensi tersebut? dan Bagaimana potensi di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur dapat dijadikan rencana pembangunan yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat, khususnya mengenai implementasi penelusuran kebutuhan masyarakat apresiatif dan kajian ilmu penelusuran kebutuhan suatu kelompok masyarakat serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pembuat dan pengambil kebijakan di Universitas Pertahanan dan lingkup Kementerian Pertahanan serta Pemerintahan Desa Sengguruh, Pemerintahan Kecamatan Kepanjen dan

Pemerintahan Kabupaten, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, untuk membuat Kebijakan khususnya kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan Kemasyarakatan, serta semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan wilayah dan pengembangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa.

Peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemetaan Potensi Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi pada Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur).”** Harapannya di masa mendatang dapat meningkatkan pendapatan warga, sehingga tercipta ketahanan ekonomi lokal berbasis potensi desa, yang nantinya akan menopang ketahanan ekonomi daerah maupun ketahanan ekonomi nasional, karena kondisi saat ini suatu negara disebut negara yang kuat bukan hanya karena kekuatan militer semata tapi adalah karena memiliki pengaruh kekuatan ekonomi yang sejahtera dan mapan.

Bertitik tolak dari fenomena yang diungkap dalam latar belakang, maka dapat dikemukakan fokus penelitian dengan pernyataan masalah (problem statement) sebagai berikut : belum teridentifikasinya potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh desa, dan belum adanya aplikasi jenis pelatihan yang sesuai kebutuhan masyarakat desa, pembangunan, dan inovasi sosial terhadap potensi wilayah setempat di Desa Sengguruh. Oleh karena belum adanya analisis kebutuhan yang tepat berbasis potensi dari Desa Sengguruh itu sendiri yang saat ini sangat diperlukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif menggunakan triangulasi Data dan Tehnik analisa data, pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen kemudian dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* kemudian dilakukan reduksi data dan analisa ulang sehingga akan lebih mudah dipahami.

Definisi Empowerment atau pemberdayaan menurut Dr Oos M Anwas berarti merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat yang didorong

untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, serta memiliki daya saing melalui berbagai kegiatan secara gotong royong.¹² Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan menurut Suhendra, pemberdayaan adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”. Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan ke kurang beruntungan (*empowerment*

aims to increase the power of disadvantage)”.¹³

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Masyarakat

¹² Oos M. Anwas, Dr., Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Alfabeta, Bandung. 2014, hal 02

¹³ Suhendra, K, 2006, Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Alfabeta, hal. 74-75

dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya.

Menurut Prof I Nyoman Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut: Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.

Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, juga sanggup berperan serta dalam pengembangan di masyarakat.

Menurut Prof. Widjaja yang dimaksud dengan pemberdayaan

masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Dari pendapat tersebut maka menurut peneliti pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan cara pengembangan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat memerlukan pendampingan untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai potensi dan kemampuan yang mereka miliki.

Popularitas istilah “Pembedayaan” tidak sebanding dengan realisasinya, yang bahkan di negara kita Indonesia sendiri sampai ada satu Kementerian yang menangani Pemberdayaan, sebut saja menteri Pemberdayaan Perempuan”, bahkan di level Pemerintah Daerah terdapat Badan yang menangani Pemberdayaan yaitu Bapermas atau Badan Pemberdayaan Masyarakat yang menunjukkan arti pentingnya pemberdayaan itu sendiri. Kegiatan pemberdayaan bukan sekedar semudah membalikkan telapak tangan, kegiatan pemberdayaan bukan sekedar membangun sesuatu, memberikan pelatihan ketrampilan, melakukan pendampingan, memberikan sumbangan atau hadiah, atau bentuk-bentuk kegiatan lainnya.

Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan

berkesinambungan bagi generasi selanjutnya.¹⁴

Potensi secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai arti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya dan wilayah dalam hal ini bermakna lingkungan daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan atau desa),¹⁵ dan hal itu bisa berarti sesuatu kemampuan yang sudah dimaksimalkan maupun kemampuan yang belum tergali atau belum tersadari ada dan melekat di wilayahnya sehingga belum dimanfaatkan keberadaanya.

Karena itu potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu agar membuatnya bermanfaat bagi masyarakat. Diperlukan identifikasi pengenalan potensi dan penelusuran lebih jauh tentang potensi itu sendiri, sehingga masyarakat mengenal potensi yang dimiliki dan dapat mengembangkan potensi yang

¹⁴Nailatul Husna, Irwan Noor, Mochammad Rozikin, Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Menguatkan Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik, Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No. 1.

¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/potensi>, diakses pada tanggal 6 Juli 2018.

dimilikinya tersebut menjadi kekuatan yang dapat menambah kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Pengertian Ketahanan Nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Istilah ketahanan nasional sudah dikenal sejak awal tahun 1960-an. Pada saat itu ketahanan nasional belum diberi definisi tertentu dan belum disusun dalam suatu konsepsi yang lengkap. Istilah ketahanan nasional dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan teritorial atau masalah wilayah Pertahanan keamanan pada umumnya.

Definisi Lemhannas tentang Ketahanan Nasional baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1968. Pada waktu itu Lemhannas mendefinisikan ketahanan nasional sebagai keuletan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi segala

kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Pengertian tersebut direvisi pada tahun 1969, menjadi keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hingga saat ini pengertian tersebut menjadi rujukan yang digunakan seluruh elemen bangsa.

Sedangkan Ketahanan Ekonomi menurut Wahidin (2005:148) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi sebagai berikut; Bumi dan Sumber Alam yaitu Kondisi geografis suatu negara akan mempengaruhi transformasi sumber kekayaan alam, maupun untuk distribusi hasil produksi. Sedangkan sumber kekayaan alam suatu negara akan dapat mempengaruhi penyediaan bahan baku bagi kepentingan produksi. Tenaga Kerja yang menjadi indikator Pertambahan penduduk akan

mengakibatkan bertambahnya usia kerja. Tapi, jika tidak disertai penambahan lapangan kerja tidak akan dapat meningkatkan produktivitas, bahkan akan meningkatkan jumlah pengangguran. Untuk memanfaatkan tenaga kerja yang besar tersebut agar dapat meningkatkan produksi ditempuh kebijakan nasional dengan transmigrasi ke daerah yang mempunyai potensi tanah dan alam untuk diproduksi. Juga dengan mendirikan pabrik-pabrik industri secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada. Modal sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi dan distribusi hasil produksi. Modal dapat diperoleh dari dua cara yaitu: Modal dari luar negeri berupa pinjaman luar negeri, investor asing. Modal dari dalam negeri berupa pajak, tabungan masyarakat, pendapatan masyarakat, investor dalam negeri.

Industrialisasi berarti mengelola barang devisa secara modern dengan menggunakan teknologi modern akan dapat meningkatkan hasil produksi barang dan jasa baik untuk keperluan konsumen di dalam negeri maupun untuk ekspor. Industrialisasi juga akan meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk. Tapi

yang perlu diperhatikan juga adalah dampak dari industrialisasi itu sendiri, dimana dengan adanya industrialisasi tidak berakibat pada rusaknya lingkungan dan alam sekitarnya.

Teknologi yang tepat akan dapat meningkatkan hasil produksi barang dan jasa serta memperlancar distribusi hasil produksi tersebut. Penggunaan teknologi mutakhir harus disertai pembinaan sikap mental bangsa untuk menerima teknologi tersebut yang harus berdampak sosial. Teknologi yang juga menopang pada sektor-sektor ketahanan bangsa juga perlu digiatkan, misalnya ketahanan pangan atau sektor pertanian, perkebunan dan perikanan atau laut.

Hubungan ekonomi dengan luar negeri lain diperlukan untuk saling memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan negara masing-masing. Untuk meningkatkan produksi diperlukan bahan baku dan teknologi yang sebagian harus dipenuhi dari luar negeri. Demikian pula pada saat yang sama negara lain memerlukan hal yang sama. Oleh karena itu diperlukan interaksi positif saling menguntungkan, baik kerjasama

secara bilateral, regional maupun internasional.

Prasarana di bidang ekonomi adalah sesuatu yang diperlukan untuk menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa serta merupakan faktor vital bagi pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi negara dan bangsa. Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang memadai semacam infrastruktur dan jalan raya akan meningkatkan ketahanan nasional di bidang ekonomi.

Kemampuan manajerial yang baik akan dapat mengelola ekonomi secara efisien sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan memperlancar distribusi barang dan jasa hasil produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur negara dan swasta di bidang manajemen agar dapat meningkatkan ketahanan nasional di bidang ekonomi.¹⁶

Ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung

kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung akan membahayakan kehidupan ekonomi bangsa dan negara.

Dari keseluruhan faktor ketahanan diatas apabila dapat diwujudkan oleh suatu wilayah, baik itu wilayah kecil semisal desa dan berkembang ke wilayah yang lebih luas lagi kecamatan dan akhirnya akan terwujudnya ketahanan nasional di tingkat Kabupaten dan Provinsi yang akan mendorong ketahanan nasional di tingkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketahanan Ekonomi Daerah

Pengelolaan Desa yang anggarannya bersumber dari APBN merupakan wujud pengakuan Negara akan keberadaan desa. Dasar falsafah Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat desa; memajukan perekonomian desa;

¹⁶ Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 148

mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; serta untuk memperkuat masyarakat desa tidak lagi sekedar menjadi obyek pembangunan tapi ditingkatkan menjadi subyek pembangunan. Yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, turut serta dalam pengawasan jalannya pembangunan; dan turut serta dalam mengevaluasi serta pelaporan hasil pembangunan sehingga hasilnya sesuai dengan perencanaan yang berdasar pada kebutuhan masyarakat desa.

Indeks rasio gini Kabupaten Malang menunjukkan fluktuasi, dimana ada tingkat kenaikan dan penurunan pada pengukuran 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan Indeks rasio gini ini menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk yang semakin meningkat.

Perhitungan menggunakan Rasio Gini memiliki kelemahan, antara lain : Angka distribusi pendapatan penduduk tidak selalu tersedia sehingga pendekatan yang lebih sering digunakan adalah pendekatan pengeluaran konsumsi per kapita. Kelemahan pendekatan ini adalah

tidak menggambarkan struktur distribusi pendapatan yang sebenarnya. Kebenaran data yang digunakan dalam perhitungan perlu dipertimbangkan, terutama terhadap pola dan jumlahnya.

Melihat rasio gini lebih jauh sebenarnya terdapat metode pengukuran tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih pas untuk mengetahui tingkat pembangunan masyarakat yaitu Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). IPM dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

Melihat potensi di desa Sengguruh agar memberikan kontribusi kepada ketahanan Ekonomi daerah, maka banyak hal yang sangat prospek bisa dikembangkan, diantaranya potensi ekonomi, baik pengelolaan lebih lanjut tentang keberadaan pasar desa dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Kemudian dari sektor pemberdayaan masyarakat, sudah ada unit-unit usaha masyarakat yang masih bisa diwadahi dan dikembangkan seperti adanya usaha keripik tempe rumahan, batik malangan “Batik Zheng”, SPBU dan usaha pertanian masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan tinggal

bagaimana desa menjembatani dan mengelolanya.

Sektor sejarah juga Sengguruh memiliki nilai historis yang luar biasa, tinggal bagaimana menjaga nilai-nilai luhur tinggalan sejarah yang ada, melestarikan dan mengenalkannya sehingga Sengguruh berpotensi menjadi desa wisata. Adapun sektor lainnya di Sengguruh juga sudah ada Bank Sampah yang hal tersebut sudah dapat meminimalisir masalah pengelolaan sampah, dan turut andil dalam meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat warga masyarakat. Adapun sektor pendidikan Sengguruh juga tidak terlalu ketinggalan dibandingkan dengan desa lain, karena sudah ada tempat pendidikan mulai pendidikan anak usia dini, tingkat sekolah dasar, sekolah menengah dan juga ada sekolah berbasis agama dan sekolah bilingual yang berbasis pada lingkungan.

Melihat data IPM posisi Kabupaten Malang ditengah-tengah dibanding Kabupaten lainnya, tapi masih rendah dibanding Kabupaten Blitar, Tulung Agung apalagi Kota Malang maupun Kota Batu. Hal itu lebih disebabkan karena masih terbatasnya jumlah Rumah sakit dan juga jumlah kampus perguruan tinggi yang ada

di Kabupaten Malang. Sedangkan Industri-industri yang ada seperti perusahaan-perusahaan juga tidak begitu banyak, untuk wilayah Jawa Timur wilayah Industri lebih terkonsentrasi di wilayah Pasuruan dan Sidoarjo.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara keseluruhan penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Desa dalam mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah yang dilaksanakan di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ini dapat berjalan dengan baik, dimana respon positif ditunjukkan oleh responden atau informan baik itu yang berasal dari masyarakat desa, aparat desa dan pihak kecamatan dan Badan Pusat Statistik serta Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang. Mereka berkenan memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun tesis.

Dan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pengetahuan masyarakat desa untuk mengenali potensi yang ada di desanya juga perlu diarahkan, agar sumber daya yang ada di desa dapat dimaksimalkan untuk kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat secara gotong royong dan bersama-sama. Bukan hanya mengandalkan pada bantuan-bantuan semata baik itu bantuan dari Pemerintah maupun *Non Government Organization* (NGO) maupun pihak swasta.

Analisis kebutuhan berbasis pemetaan potensi saat ini dirasakan sesuai dengan konsep rencana pelatihan di desa, hal ini disebabkan masyarakat cenderung mengungkapkan masalah-masalah yang pemecahannya harus dengan kebutuhan dari bawah. Berdasarkan hal itu, dewasa ini dikembangkan konsep analisis kebutuhan berdasarkan potensi yang harus dikembangkan di lokasi desa dengan berlandaskan pada mimpi dan modal yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (*Strength Based Solving*). Dengan konsep tersebut, masyarakat diminta untuk memilih kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan mereka. Kecakapan itu mencerminkan kebutuhan yang diperlukan agar dapat meningkatkan pendapatan .

Desa Senggruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur adalah salah satu wilayah yang perlu mendapatkan jenis-jenis

pelatihan dan pengembangan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut. Pemetaan kebutuhan berbasis potensi di Desa Senggruh memerlukan strategi yang tepat dalam menentukan jenis pelatihan, pembangunan, dan inovasi sosial sesuai potensi dari desa itu sendiri. Diselenggarakannya penelitian di Desa Senggruh agar teridentifikasinya kebutuhan masyarakat sehingga didapatkan daftar prioritas kebutuhan masyarakat, agenda pembangunan, serta untuk mendukung program dan pengembangan wilayah yang diperlukan untuk inovasi sosial.

Harapannya di masa mendatang dapat meningkatkan pendapatan warga, sehingga tercipta ketahanan lokal berbasis potensi desa, yang nantinya akan menopang ketahanan ekonomi daerah maupun ketahanan ekonomi nasional, karena kondisi saat ini suatu negara disebut negara yang kuat bukan hanya karena kekuatan militer semata tapi adalah karena memiliki pengaruh kekuatan ekonomi yang sejahtera dan mapan.

Desa Senggruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan lancar

dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil riset cepat, wawancara, pengamatan langsung serta analisis hasilnya, dapat disimpulkan sebagai berikut : Belum terwadahnya sektor-sektor produktif yang ada di Desa; seperti adanya Pasar Desa, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Batik khas desa, dan sektor-sektor produktif lainnya yang ada di desa, sehingga pengelolaannya lebih mudah dan lebih tertata. Bertambahnya beban aparat desa, sehingga perlu pembantu yang meringankan tugas-tugas aparat desa terutama setelah turunya Dana Desa yang menambah beban pekerjaan bagi aparat desa, serta berfungsi memberi ruang gerak dan aktifitas bagi generasi muda untuk ikut aktif membangun desanya.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut; Perlunya pembentukan Badan Usaha Milik Desa untuk mewadahi sektor-sektor produktif yang ada di Desa; seperti adanya Pasar Desa, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Batik khas

desa, dan sektor-sektor produktif lainnya yang ada di desa. Pempungisian Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk membantu tugas-tugas aparat desa terutama setelah turunya Dana Desa yang menambah beban pekerjaan bagi aparat desa, serta berfungsi memberi ruang gerak dan aktifitas bagi generasi muda untuk ikut aktif membangun desanya. Adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti lain diharapkan untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut dengan mengambil wilayah penelitian yang lebih luas, sehingga lebih menyempurnakan penelitian ini, dan dengan masyarakat sasaran yang lebih kompleks.

Daftar Pustaka

- Agus Purwanto Erwan dan Ratih Sulistyastuti Dyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Arikunto. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*. Jakarta : Rineka Apta.
- Balai Besar Latihan Ketransmigrasian, 2014. *Panduan Training Needs Assessment Apresiatif, Jakarta, Modul Kemenakertrans*.
- Cresswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Ibrahim Amin. 2006. *Model Ketahanan Nasional Sebagai Model Administrasi Negara Untuk Memberdayakan Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju.
- Indiahono Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Lemhannas. 2014. *Konsepsi Ketahanan Nasional – Modul Bidang Studi/ Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suprayitno Bambang, 2017 *Ekonomi Publik Konsep dan Implikasi Kebijakan*, Yogyakarta; UPP Stim YKPN
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfa Beta.
- Samsul Wahidin. 2015. *Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Yusgiantoro Purnomo, 2010. *Perekonomian Indonesia*, Gramedia Jakarta, Pustaka Utama.
- Yusgiantoro Purnomo, 2014. *Ekonomi Pertahanan*, Gramedia Jakarta, Pustaka Utama.

Dokumen

- BPS Kabupaten Malang. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Menurut Pengeluaran 2012-2016*. Malang : BPS Kabupaten Malang.
- RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Sengguruh, Tahun 2013-2019
- Rusnadi Padjung, Desa; Bukan Sekedar Pemerintahan Lokal, Pusat Data

dan Studi Kemendesa, (Jakarta; Info Desa Edisi Oktober 2016)

Jurnal

- Nailatul Husna, Irwan Noor, Mochammad Rozikin, Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Menguatkan Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik, Universitas Brawijaya, Malang, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No. 1.
- Priyarsono, D.S. 2017. “Membangun dari Pinggiran : Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional”. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Nomor 1.
- Purnamasari Hanny dkk. 2016. “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang”. *Jurnal Politikom Indonesiana*, Volume 1, Nomor 2.
- Robidas A. Edna. 2017. The Relationship between Community Gardening and Empowerment: a study Los Angeges Gardens.
- Wang, Xun. 2007. “One Country, Two Systems : China’s Economic Policies Towards State & Township/Village-Owned Enterprises, 1978-1992”. *Journal Of Third World Studies*, Volume 24, No. 2.

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

- Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2010 tentang Badan
Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, Dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 66
Tahun 2016 tentang Kode Nama
dan Wilayah Kerja Statistik Tahun
2016.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017
Tentang Perubahan Rincian Dana
Desa Menurut Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2018.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.